

# Representasi Nilai Bahasa, Sastra dan Politik dalam Definisi Wilayah Sengketa Palestina-Israel (Kajian Poskolonialisme)

Mohamad Ramdon Dasuki  
Universitas Pamulang Indonesia

dosen01761@unpam.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan posmodernisme dan poskolonialisme dalam perspektif bahasa, sastra, dan politik. Sebagaimana posmodernisme dan poskolonialisme bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelaahan dan pemahaman dari karya bahasa, sastra, politik yang lebih utuh, dan tidak terikat lagi oleh struktur teks. Sementara metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis isi. Dengan asumsi yang demikian itu, maka baik posmodernisme maupun poskolonialisme lebih berusaha untuk melihat sebuah karya bahasa, sastra, dan politik dari berbagai sisi yang ada. Hasilnya; Posmodernisme dengan keras menolak segala penjelasan apa pun yang harmonis, universal dan konsisten, sebagaimana yang menjadi semangat kabur dalam semangat modernitas. Adapun simpulannya kajian dalam bidang poskolonialisme mencakup seluruh khazanah tekstual, khususnya karya bahasa, sastra, dan politik yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang seperti persoalan definisi wilayah sengketa antara Palestina dengan Israel.

**Kata kunci:** sastra, politik, poskolonialisme

## Abstract

*This study aims to describe postmodernism and postcolonialism in the perspective of language, literature, and politics. As postmodernism and postcolonialism aim to produce a study and understanding of language, literature, and politics that are more complete, and are no longer bound by the structure of the text. While this research method uses a descriptive method with a content analysis approach. With such assumptions, both postmodernism and postcolonialism try harder to see a work of language, literature, and politics from various existing sides. The result; Postmodernism strongly rejects any explanation that is harmonious, universal and consistent, as is the vague spirit in the spirit of modernity. The conclusion is that studies in the field of postcolonialism cover all textual treasures, especially works of language, literature, and politics that have experienced imperial power since the beginning of colonization until now, such as the problem of defining the disputed territory between Palestine and Israel.*

**Keywords:** literature, politics, postcolonialism

## Pendahuluan

Tulisan atau penelitian atau buku atau pembahasan tentang konflik Palestina-Israel sudah sangatlah banyak sejak dimulainya era konflik ini terjadi bahkan secara historis jauh sebelum negara Zionis ini diproklamirkan tahun 1948 tidak seperti sebelumnya yang kurang diliput oleh media massa maupun media sosial dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu penulis kali ini menulisnya dari sudut pandang yang berbeda terutama dalam menganalisisnya dari sudut pandang ilmu sosial seperti bahasa, sastra, budaya, dan politik yang penulis anggap sangat relevan, dengan memposisikan diri

Zionis Yahudi Israel sebagai objek yang diteliti layaknya yang selama ini mereka atau dunia Barat lakukan lewat perspektif Orientalisme bahwa timur itu sebagai objek kajian. Bahwa timur sebagai timur dan barat sebagai barat ternyata sampai kini masih menjadi kendala (perspektif Oksidentalisme) bahwa timur berada di orbitnya dan barat berada di orbitnya karena sebagian kalangan inginkan barat juga ingin menjadi bagian dari timur sebagaimana timur ada yang inginkan menjadi bagian dari barat.

Menarik untuk diungkap dan dikembangkan sudut pandang ini layaknya mereka dunia barat yang selama ini terapkan guna dapatkan hasil yang nyata dan fair dalam banyak hal, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari dunia timur terhadap dunia barat. Kenapa penulis sebut Zionis Yahudi Israel sebagai bagian dari Barat karena mereka telah benar-benar melakukan perannya sebagai representasi dunia Barat dalam melanggengkan otoritasnya di belahan dunia Timur demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Layak untuk dicermati muncul berbagai ungkapan bahasa dan sastra yang harus ditelisik menurut kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku, menjadi sering luput dari perhatian kebanyakan orang.

Bahasa di sini tentu dapat berupa ucapan, ungkapan, atau istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat di dunia baik yang terserap pada bahasa di media sosial maupun media massa sehingga nyaris luput dari kritik dan koreksi secara akademik karena nampaknya aspek politik menjadi lebih dominan. Sebagaimana aspek sastra yang lazimnya mengacu kepada data autentik dan fakta yang aktual juga sering diabaikan karena kepentingan politik. Sehingga dapat dikatakan tantangan 'budaya sebagai politik' yang berbentuk bahasa dan sastra ini luntur menjadi konsumsi politik masih terus menggejala.

## Metode

Kajian mengenai representasi nilai bahasa dan sastra dalam konflik Palestina-Israel ini menggunakan teknik penulisan narrative review. Penggunaan teknik naratif dilakukan untuk memberikan narasi secara lengkap dan utuh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber dalam mendukung kajian ini diperoleh dari berbagai artikel, jurnal, sumber media online, media sosial dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memberikan cakupan luas dalam pembahasan yang diuraikan dengan menampilkan kelengkapan dari berbagai sudut pandang dan sumber.

Dalam mendukung kajian yang dibahas, peneliti melakukan pengumpulan sumber yang relevan dengan narrative review yakni menggunakan metode Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta-Analysis (PRISMA). Merupakan serangkaian pengumpulan sumber dari tahap mencari literatur, melakukan pengunduhan, dan penyaringan literatur untuk dipilih. Selain itu, kajian ini diperkuat oleh sumber-sumber pemberitaan media online serta media sosial untuk melihat relevansi terhadap narasi-narasi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini menggunakan jurnal internasional, jurnal nasional, dan buku. Sebagaimana metode penelitian yang digunakan peneliti padukan dengan hukum normatif (yuridis normatif) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang menjadikan bahan hukum digunakan dalam penelitian. Peneliti melakukan dengan cara mencari informasi dan data dari berbagai buku, undang-undang, jurnal, dokumen-dokumen serta penelitian sebelumnya.

## Hasil

Representasi bahasa dan sastra sering diabaikan jika dihadapkan pada fenomena politik tetapi aspek bahasa dan sastra akan selalu mencatatnya kepongahan para petualang politik karena bagaimanapun juga definisi dari apa yang diusung atas nama kajian orientalisme, kolonialisme, atau poskolonialisme misalnya tidak akan luput dari hekekat ontologis dan epistemologisnya. Berbagai upaya peradaban lama yang usang sekalipun selalu dianggap benar walaupun menurut sudut pandang peradaban lain salah, karena tuntutan budaya eksistensi kelanggengan akan terus menjadi prioritas. Kekhawatiran keruntuhan budaya dan peradaban dari suatu bangsa sering menjadi dasar politis sehingga selubung ideologi, sejarah, dan peradaban dipaksa direkayasa demi untuk kepentingannya, kelompoknya, dan peradabannya serta budayanya. Nilai bahasa, sastra, bahkan ilmu pengetahuan sekalipun seringkali digadaikan jika fenomenanya harus berhadapan dengan tuntutan politik seperti tanah yang disengketakan oleh pihak Palestina dan Zionis Israel akhirnya menjadi bias dan semu.

## Pembahasan

### Representasi Bahasa dan Sastra

Secara historis kontak kedua bangsa ini (Arab dan Yahudi) menurut catatan dari segi geografis merupakan tetangga dekat, bahkan dari sisi ras merupakan saudara terdekat antara keduanya. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab berasal dari satu rumpun yang sama yaitu rumpun Semit, beberapa nama Ibrani yang disebutkan di perjanjian lama berasal dari bahasa Arab sehingga orang Arab Selatan tidak akan terlalu sulit memahami ayat pertama dari 'Kitab Kejadian' yang berbahasa Ibrani (Hitti. 2014.49).

Lazimnya kajian yang berlaku dalam suatu kajian biasanya dinamakan kajian Poskolonial atau kajian setelah masa kolonialisme, namun akan menjadi miris saat kajian sastra atau budaya misalnya yang terjadi di abad ke-21 seperti sekarang ini. Apa yang terjadi era kolonialisme Zionisme Israel terhadap Palestina sejak tahun 1948 lalu sampai sekarang ini, kenyataannya berbalik dengan sebagian besar belahan dunia lain yang telah memerdekakan diri dari imperialisme dunia Barat tetapi rakyat dan bangsa Palestina memasuki kembali era kolonialisme. Sehingga jika ada kajian kritik sastra atau budaya atau apalah namanya setelah era kolonialisme seperti sekarang ini dapat dikatakan sebagai avant-garde " (pengucapan bahasa Prancis: [avā̃gɑ̃ʁd]) berarti "advance guard" atau "vanguard". Kata ini digunakan pada orang atau karya yang bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim.

Karya-karya avant-garde umumnya bertujuan untuk melawan batas-batas dan norma dalam suatu kebudayaan. (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)". (Wikipedia Indonesia). Atau pelopor sebagai kajian bukan poskolonialisme lagi karena unik dimana seluruh dunia telah beranjak meninggalkan kolonialisme tapi ini kembali mundur ke belakang mengulangi bencana kemanusiaan yang kedua kalinya. Sehingga dapat saja orang bebas menamakannya, entah sebagai era neo-kolonialisme modern atau pascakolonialisme atau kelak dinamakan kajiannya dengan sebutan poskolonialisme ke-2.

Tonggak kelahiran teori postkolonial ditandai dengan terbitnya buku Edward W. Said (1978), *Orientalism*. Tesis utama buku karya Said tersebut menggunakan pendekatan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebagaimana diartikan oleh Michael Foucault dalam bukunya, *The Archeology of Knowledge* (1972) dan *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977), kaum orientalis berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenai Timur tidaklah semata-mata didorong oleh kepentingan

pengetahuan, tetapi juga kepentingan kolonialisme. Pengetahuan bagi kaum Orientalis adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, yakni pengetahuan yang dipenuhi dengan visi dan misi politis ideologis. Studi tersebut juga semata-mata merupakan bentuk lain atau kelanjutan dari kolonialisme.

Bangsa Timur dikonstruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasionalitas, berakhlak bejat, kekanak-kanakan, dan “berbeda” dengan Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan “normal” (Santosa: 2012.1). Atas dasar pemahaman tersebut kritik postkolonial lahir dan dibidani oleh Edward W. Said, Homi Babha, dan Gayatri Chakrovorty Spivak. Kritik postkolonial yang dikembangkan Spivak meliputi pemikiran poststrukturalisme pada kritik sastra, filsafat kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxisme, dan post-Marxisme.

Secara umum postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium kolonialisme modern. Dalam pengertian yang lebih luas, postkolonial juga mengacu pada objek sebelum dan pada saat terjadinya kolonialisme (Santosa: 2012.1). Dalam kaitannya dengan kritik sastra, postkolonial dipahami sebagai suatu kajian tentang bagaimana sastra mengungkapkan jejak perjumpaan kolonial, yaitu konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya dalam kondisi hubungan kekuasaan tidak setara, yang telah membentuk sebagian yang signifikan dari pengalaman manusia sejak awal zaman imperialisme Eropa (Day dan Foulcher, 2008:2—3). Jadi, menurut Day dan Foulcher, kritik postkolonial adalah strategi membaca sastra yang mempertimbangkan kolonialisme dan dampaknya dalam teks sastra, posisi, atau suara pengamat berkaitan dengan isu tersebut (Santosa: 2012.2).

Setidaknya ada dua perspektif yang berbeda tentang wilayah atau sumber sengketa yang sampai saat ini terus diperebutkan oleh pihak-pihak yang menginginkannya sehingga konflik tak berkesudahan hingga kini. Kata Zionis disandarkan pada sebuah bukit yang terletak di bagian selatan Baitu al-Maqdis dahulu tempat itu dihuni oleh orang-orang yang diusir oleh raja Bani Israel untuk dihukum dan dijemur di sana sehingga di kemudian hari orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai tempat yang suci karena Tuhan ada di sana seperti yang pernah disebut dalam al-Mazmur (kitab suci mereka). Sementara dalam Ensiklopedia Britania Raya disebutkan bahwa kata Zionisme; merujuk pada perjuangan bangsa Israel, berkumpulnya mereka di Palestina, kembali berdirinya negara Yahudi, kembali dibangunnya pondasi (bangunan peninggalan), dan didirikannya singgasana raja Daud di al-Quds kedua, oleh pemimpin dari keturunan Daud. Pada sisi lain menurut Ensiklopedia Yahudi sendiri disebutkan tentang kata Zionis; bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi ingin menggabungkan segala urusannya, menuju ke al-Quds, kalahkan kekuatan musuh-musuh, dan kembali beribadah serta mendirikan kekuasaannya di Bait al-Maqdis.

Oleh karena itu Zionis merupakan tujuan untuk realisasikan cita-cita Yahudi, dengan kuasai Palestina menjadi pusat negara Yahudi, dan untuk kembalikan bangunan kuil tempat ibadah Sulaiman berada di tempat masjid al-Aqsa. Oleh karena itu Zionis adalah seorang Yahudi yang terpengaruh hidupnya di Palestina terhadap orang lain dari berbagai negeri juga mereka yang turut membantu orang Yahudi secara materi dan immateri untuk berdirinya negara Yahudi. Sementara Zionisme adalah suatu pemikiran dan gerakan yang mengajak kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina tidak kekikiran tetapi sudah lama karena telah ditanam sejak lama tahun 721 SM (Thanthawi. 1997: 717-718). Sementara definisi wilayah Palestina menurut Hamas adalah merupakan tanah wakaf umat Islam kepada seluruh umat Islam di dunia sampai hari

kiamat. Tanah tersebut tidak boleh dikurangi maupun dikuasai oleh negara-negara lain, apalagi negara-negara non-Islam.

Dalam pandangan Hamas, patriotisme di Palestina merupakan bagian dari akidah. Untuk Hamas, jihad melawan penjajah merupakan kewajiban setiap Muslim, bahkan wanita tidak perlu izin suami dan hamba sahaya juga tidak perlu izin kepada tuannya untuk berjihad melawan penjajah. Oleh karena itu, menurut Hamas, jihad untuk pembebasan Palestina merupakan kewajiban atas setiap Muslim di dunia. Hal-hal itu dapat dilihat dalam piagam Hamas tahun 1988. Hamas adalah gerakan yang merupakan sayap dari organisasi Islam Ikhwanul Muslimin dari Mesir (Jazuli. 2023:1-9). Dengan demikian dari dua definisi yang berbeda ini saja sudah menimbulkan interpretasi karena terjadi perbedaan yang signifikan antara dua pihak yang berseberangan. Terlebih jika diruntut lebih rinci lagi secara historis, agama, dan sosial tak kalah peliknya jika kita menelusurinya.

Namun ada satu ukuran yang dapat mengukur secara ilmu pengetahuan kenapa definisi itu berbeda dan saling bertolak belakang, nampaknya ukuran kepentingan politik yang membedakan antara keduanya. Tanpa berpanjang lebar diskusi tentang konflik ini dapat dipahami oleh karena faktor kepentingan ekonomi, materialisme, industri masa depan, perdagangan, bahan baku, dan lain sebagainya yang akhirnya harus dibungkus dengan satu label yaitu politik. Karena politik secara definisi tidak lain untuk melaksanakan tujuan-tujuannya perlu menentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan (power & authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan perorangan (Budiardjo.1988: 8). Menurut Edward W.Said pertimbangan bahasa dan sastra sama dengan pertimbangan sejarah yang mampu menyaring bukti dan interpretasi serta gagasan yang dapat saja dibajak oleh karena kepentingan kekuasaan ( Said. 2017: xv).

Hal ini menurut penulis nampak berlaku bagi kekuasaan dimanapun berada tak terkecuali kekuasaan Zionis yang terus berseteru dengan budaya-sastra-bahasa yang ada di sekitarnya seperti Arab, Islam, Timur, bahkan dunia secara luas yang sering melawan arus kebijakan dunia luas demi langgengnya kekuasaan kolonialisme dan imperialisme mereka di wilayah Timur Tengah sejak tahun 1948 lalu. Karena bagaimanapun juga secara bahasa dan literasi peninggalan sejarah tertulis yang telah menjadi literasi sastra timur telah tercatat bahwa telah ratusan tahun lamanya masyarakat Arab dan komunitas lainnya telah mendiami wilayah Palestina dan benar adanya pernah berkuasa di wilayah itu kekuasaan dari etnis Yahudi seperti halnya etnis lain di dunia yang pernah memerintah suatu wilayah di suatu belahan dunia. Bagi seorang yang negerinya pernah terjajah Edward W.Said membahasakannya dengan konsep kesadaran kritis yang dinamis (Said. 2017: xv). sebagaimana seorang Hassan Hanafi membahasakannya dengan konsep Oksidentalisme (Hanafi. 2000:18). namun berbeda istilahnya dengan seorang Antonio Gramsci dari Italia sebagai pemilihan dan pemilahan catatan sejarah (Said. 2017: xv). Edward W.Said memaknai slogan-slogan bahasa yang ditulis gerakan Hamas di tembok-tembok wilayah pendudukan Palestina dimaknai sebagai ekspresi bentuk ketidakadilan dan penindasan guna menghancurkan

Orientalisme dan menegakkan Oksidentalisme. Baginya jarang sekali membicarakan kesusastraan tanpa membahas tentang politik demikian sebaliknya (Said. 2017: xv). Mural atau graffiti yang berbentuk tulisan atau gambar di berbagai penjuru tembok dinding wilayah Palestina jika dimaknai secara politis, bahasa, dan sastra dari sudut pandang warga Palestina tak lain merupakan bentuk perjuangannya menuntut keadilan dan kemerdekaan yang telah dirampas sejak tahun 1948 lalu. Tetapi akan berbeda maknanya jika ditinjau dari sudut pandang orang Zionis Israel dan para pendukungnya sebagai bentuk pemberontakan dan pelecehan. Oleh karena itu sulit dipisahkan membedakan makna suatu tulisan atau karya sastra tanpa dikaitkan dengan aspek politik walaupun diutarakan secara bahasa atau sastra. Kajian sastra menurut Edward W.Said sangat minim dikaji oleh para Orientalis sehingga dalam prakteknya banyak kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsir bangsa-bangsa Timur beserta budaya dan agamanya sehingga menjadi hal yang fatal. Oleh karena itu gerakan mengembalikan orbit nya Barat sebagai Barat dan Timur sebagai Timur harus digaungkan dengan konsep Oksidentalisme. Bahkan memasuki periode modern seperti sekarang ini justru distorsi semakin parah, Barat dalam memahami Timur khususnya seperti pemahaman mereka sampai saat ini bahwa Arab adalah eksimplifikasi dari al-Quran seperti halnya sejarah Amerika Serikat sebagai sebuah gambaran Perjanjian Baru(Said.2017:49). Padahal tidaklah demikian, Arab bukanlah representasi dari Islam melainkan hanyalah penganut agama Islam saja yang kualitas ke-Islamannya relatif karena bergantung pada praktek ibadahnya dan kadar keimanan serta ketaqwaannya.

Menurut penulis juga terjadi persamaan atau berbanding lurus bagi pemahaman masyarakat Barat di Eropa dan Amerika Serikat yang setiap kali merespon fenomena politik, sosial, dan budaya di Timur-Tengah selalu menggunakan pemahaman Zionis Yahudi Israel sebagai minoritas tapi superior terdhalimi yang harus dibela dan disokong penuh oleh Barat dan dunia atas segala bahaya ancaman banyak negara Arab dan Islam yang mengelilinginya. Dialektika slogan bahasa seperti tersebut di atas terus digaungkan oleh kekuatan-kekuatan besar Zionis di dunia media, sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Realitanya bahasa propaganda merupakan politik kuasa media yang menurut (Noam Chomski: 94) *Media Control: The Spectacular and Achievements of Propaganda* bahwa setiap hari bahkan setiap menit dan detik kita sedang menyaksikan pertempuran berbagai kepentingan di media massa. Demokrasi pasar dalam satu tatanan neoliberal adalah doktrin dan realitas. Kebebasan tanpa kesempatan adalah satu hadiah iblis, dan penolakan untuk menyediakan kesempatan-kesempatan semacam itu adalah kejahatan (Chomski. 2021: vii).

Sementara produk budaya berdasarkan kajian budaya teori dan praktek (Chris Barker: 2016.103) adalah dibentuk melalui produksi makna-makna populer yang terletak pada momentum konsumsi. Makna-makna semacam itu merupakan kontestasi untuk memperebutkan nilai-nilai kultural dan politik atau dengan kata lain sebagai arena penerimaan dan penolakan dalam pertarungan memperebutkan makna-makna kultural atau dengan istilah lain sebagai situs dimana hegemoni budaya diamankan atau ditentang. Budaya pop atau budaya modern tidak berkaitan lagi dengan nilai budaya atau nilai estetis karena penilaian-penilaian lebih tertarik pada kekuasaan, sehingga menurut mazhab Frankfurt masyarakat luas atau konsumen sebagai pihak yang selamanya pasif dan selalu dimanipulasi. Dengan kata lain yang populer itu selalu yang politis (Said. 2017:49). Pada sisi lain perlu juga sejenak menengok sudut pandang poskolonialisme yang umumnya didefinisikan sebagai teori yang lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya.

Poskolonialisme merupakan bentuk penyadaran dan kritik atas kolonialisme. Poskolonialisme juga menggabungkan berbagai disiplin keilmuan mulai dari filsafat, cultural studies, politik, bahasa sastra, ilmu sosial, sosiologi, dan feminisme. Poskolonial bukan berarti setelah kemerdekaan, tetapi poskolonial dimulai ketika kontak pertama kali penjajah dengan masyarakat pribumi. Adapun kajian dalam bidang kolonialisme mencakup seluruh khazanah tekstual nasional, khususnya karya sastra yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Tema-tema yang dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan, di antaranya, politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, kesenian etnisitas, bahasa dan sastra, sekaligus dengan bentuk praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang lain.

Oleh karena itu, teori poskolonialisme sangat relevan dalam kaitannya dengan kritik lintas budaya sekaligus wacana yang ditimbulkannya. Pemikiran poskolonial telah menjadi desentralisasi budaya Barat dan nilai-nilainya dalam studi sastra. Di tinjau dari perspektif poskolonial dunia, maka karya-karya besar pemikiran Eropa Barat dan Kebudayaan Amerika yang mendominasi filsafat, teori kritis, serta karya-karya sastra di belahan dunia, khususnya pada daerah yang sebelumnya di bawah pemerintahan kolonial. Poskolonialisme merupakan bentuk penyadaran dan kritik atas kolonialisme.

Poskolonialisme menggabungkan berbagai disiplin keilmuan mulai dari filsafat, studi budaya, politik, bahasa sastra, ilmu sosial, sosiologi, dan feminisme. Poskolonial bukan berarti setelah kemerdekaan, tetapi poskolonial dimulai ketika kontak pertama kali penjajah dengan masyarakat pribumi (Anggraini. 2018:48-49). Wilayah sengketa Palestina yang diklaim juga oleh Israel dan didukung oleh Barat dapat diperdebatkan baik secara catatan sejarah dunia (Timur dan Barat), maupun sudut pandang lainnya. Hingga seandainya Barat melalui perusahaan media seperti Google perusahaan media milik Barat telah menghapusnya dari peta akses miliknya tetap saja terus akan dipersoalkan oleh dunia akademik dan ilmu pengetahuan.

Menurut Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer dua orang teoretikus dalam mazhab Frankfurt berkesimpulan bahwa budaya sebagai pembohongan massa. Film, radio, majalah, televisi, dan lainnya diarahkan kepada suatu hasil produk walau beragam pada berbagai produk tetapi semua konsumen tidak ada yang lolos dari produk-produk tersebut (Barker. 2016: 95). Dengan pernyataan seperti tersebut di atas hakekatnya senada dengan apa yang telah diutarakan oleh Edward W. Said bahwa yang dibangun oleh Barat dalam memperoleh akses dan kebutuhan industri serta bahan baku berbagai sektor harus terus pertahankan budaya lamanya yaitu imperialisme dan kolonialisme walaupun dan bungkus tidak seperti di abad-abad lampau. Salah satunya dengan pertahankan akses kearah Timur-Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur menjadikan wilayah Palestina-Israel menjadi kuncinya sebagai batu loncatan Barat di abad-abad yang akan datang jika ingin pertahankan eksistensinya sebagai wilayah yang maju di bidang ekonomi, industri, dan sosial-politik. Hal senada juga disebutkan dari sumber lain yang mengatakan bahwa ada "Western Interest" yang menjadi akar utama konflik Palestina-Israel seakan menjadi investasi jangka panjang Barat sehingga harus dipelihara kelanggengannya baik sekarang maupun masa yang datang (Nurdyawati: 24-37).

Selain faktor internal Israel yang cenderung menghambat upaya perdamaian, ada beberapa faktor penyebab konflik Palestina-Israel yaitu; Menguatnya posisi Israel karena selalu didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, munculnya tokoh-tokoh ekstrim di Israel yang semakin agresif dan konfrontatif. Di pihak lain, posisi Palestina

menjadi semakin lemah akibat semakin lemahnya persatuan bangsa Arab, serta adanya konflik internal di tubuh Palestina sendiri (Firdaus. 2020: 107). Berdasarkan alasan ini lebih mempertegas bahwa konflik Palestina-Israel tidak hanya secara budaya baik itu bahasa maupun sastra, tetapi juga secara politik, ekonomi, dan sosial memiliki efek domino secara internasional berdampak luas seperti yang telah penulis paparkan di atas. Kedekatan Amerika Serikat dengan Israel, menurut pemberitaan *The New York Times*, bisa dilihat dari rutinitas Amerika memberikan bantuan ke Israel sebesar USD 77 miliar sejak tahun 1967. Sejak Perang Oktober 1973, Washington sudah memberi bantuan langsung ekonomi dan militer kepada Israel sebesar USD 140 miliar. Sedangkan sejak 1976 sampai sekarang, setiap tahun Amerika Serikat memberi Israel bantuan langsung USD 3 miliar, seperenam dari budget bantuan luar negerinya (Firdaus. 2020:109).

Menurut penelusuran penulis setidaknya karena faktor pendekatan produk budaya yang dikemas melalui bahasa kapitalis yang telah disebutkan sebelumnya di atas, telah membawa dampak simpatik luas di dunia terutama di dunia Barat. Seperti halnya marketing produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang diiklankan lewat radio, televisi, majalah, media massa, dan media sosial yang hingga kini masyarakat luas tidak ada pilihan dan tidak ada hak menolak atau berargumen karena sistem yang diciptakan oleh dunia kapitalis sedemikian rupa.

### **Representasi Politik**

Menurut penulis ada perbedaan corak politik yang dijalankan oleh para orientalis terhadap Orientalismenya dengan Oksidentalisme yang cukup signifikan. Jika Orientalisme inginkan timur sebagai objek kemudian dalam perkembangan dan kenyataannya sering menjadi pintu masuk untuk kepentingan barat dari timur. Sementara sementara Oksidentalisme menurut Hassan Hanafi justru ingin mengembalikan barat kepada orbitnya di barat dan timur tetap berada di orbitnya yang semula yaitu di timur. Sekalipun Bryan S. Turner berpendapat berbeda bahwa ada konsekuensi lain yang berbeda dari perdebatan tentang Orientalisme dan Oksidentalisme yang sama jahatnya seperti penolakan segala sesuatu yang berhubungan dengan barat dan penolakan implisit tentang modernisasi (Turner. 2002:9).

Orientalisme bagi Edward W. Said merupakan contoh objektif yang paling sempurna bagaimana pengetahuan dan tulisan dapat diangkat dari teks ke permukaan dunia dengan kekuatan dan politis kepentingan Orientalisme yang nyata (Said. 2017:54). Contoh jelas lain yang pernah dilakukan oleh Orientalis Belanda di Indonesia Snouck Hurgronje yang kerap menerbitkan laporan penelitiannya terhadap Islam-Indonesia sebagai pengetahuan dan tulisan yang sengaja diangkat dari teks dan fenomena sosial ke permukaan dunia dengan kekuatan dan politis kepentingan Kolonial Hindia Belanda (INIS.1995:3).

Hal senada kini sedang berlangsung di wilayah pendudukan Palestina yang sebenarnya masih satu bentuk dari bentuk imperialisme dan kolonialisme dengan jelas-jelas merebut tanah penduduk setempat dan memaksa mengusir atau memerangi penduduk setempat hingga wilayahnya diduduki untuk dibangun pemukiman kaum pendatang Yahudi dari seluruh dunia. Dunia Timur sesungguhnya telah membantu mendefinisikan Barat (atau Eropa) sebagai imajinasi, ide, kepribadian, dan pengalaman yang berlawanan dengannya. Tidak ada satu pun hal tentang dunia Timur itu yang bersifat khayalan tetapi nyata ada karena Timur adalah suatu bagian integral dari suatu peradaban dan kebudayaan. Sementara orientalisme menampilkan bagian-bagian dari

budaya bahkan ideologis untuk dikaji sebagai kajian budayanya, perbendaharaan bahasanya, studi kesajarannya, lambang-lambang, dan doktrin-doktrin yang ada di dunia Timur.

Berlawanan dengan ini, pemahaman orang-orang Amerika tentang Timur tampak jauh lebih tidak padat dibanding dengan pengalamannya di Jepang, Korea dan Indo-Cina dalam menciptakan kesadaran tentang 'Timur'(Said.2001:2). Walaupun belakangan petualangan orang-orang Amerika telah sampai ke wilayah Afghanistan, Irak, Suriah, dan lainnya tetapi argumen Said tetap masih dapat jadi acuan sehingga selain masih menjadi negara adikuasa dunia sepertinya ingin melanjutkan petualangannya di Timur dengan terus mendukung kebijakan Zionis Israel di Palestina. Dengan demikian Said berkeyakinan bahwa kehadiran Eropa dan kemudian Amerika di Timur tetap bersifat politis sehingga kemunculan orientalisme untuk membagi geografis yang tidak sederajat; Barat dan Timur. Sehingga dalam banyak hal Barat ingin menguasai, memanipulasi, bahkan mencaplok belahan dunia yang jelas-jelas berbeda (Said. 2001:16). Sehingga dalam kenyataannya nampak jelas arogansinya kebijakan tentang pendudukan wilayah di Palestina dan pembangunan pemukiman baru yang terus diperluas dengan menghancurkan dan mengusir warga asli Palestina tanpa menghiraukan aturan HAM dan konvensi PBB. Sekalipun terjadi tindak kekerasan bahkan peperangan dan pembunuhan selalu pihak Zionis Israel akan disokong oleh Amerika dan Eropa karena persepsi Barat terhadap Timur demikian.

Hal senada disebutkan oleh Simon During bahwa praktek-praktek poskolonialisme adalah dipilihkannya bahasa, sastra, dan budaya yang sering digunakan namun aspek politislah yang menjadi alasan utama guna untuk kembali diadakannya dekolonialisasi (During. 2003:125). Bahkan menurut Leela Gandhi dalam tulisannya; *The Limits of Postcolonial Theory* menyatakan bahwa dapat dikatakan poskolonial berada diantara struktur politik dan politik secara keseluruhan. Ini merupakan salah satu jalan untuk mendorong bahwa teori poskolonial dapat dikondisikan di mana saja diantara Marxisme, Posmodernisme, atau Postrukturalisme.

Walaupun ini masih menjadi diskursus di lapangan karena berlawanan tetapi yang dapat disaksikan bersama bahwa era poskolonialisme kontestasinya akan berlangsung lama terutama di dunia ketiga (Gandhi.1998:167). Lain halnya dengan Italo Calvino tentang hubungan sastra dengan politik yang menurutnya dari banyak generasi yang ada mayoritas tidak tertarik dengan dua urusan ini baik urusan politik maupun urusan sastra karena sensasi kedua hal ini kosong dan tidak dapat dipercayai. Namun menurutnya ketika politisi dan orang-orang yang berpikiran politik terlalu memperhatikan sastra pertanda buruk terutama bagi sastra karena pada saat itulah sastra berada dalam bahaya yang paling besar. Tapi ini juga pertanda buruk ketika mereka (para politisi) tidak ingin mendengar kata yang disebutkan, dan ini terjadi pada politisi borjuis paling tradisional maupun tokoh revolusioner paling ideologis, hal ini pertanda buruk bagi mereka (para politisi) karena ini menunjukkan mereka takut dengan penggunaan bahasa dalam bentuk apapun yang mempertanyakan ketetapan bahasa mereka sendiri (Calvino. 2022:94).

Sebagaimana Italo Calvino menguraikan bahwa ada dua cara berpikir yang salah tentang kemungkinan penggunaan sastra secara politik. Pertama, mengklaim bahwa sastra harus menyuarakan kebenaran yang sudah dimiliki oleh politik untuk percaya bahwa besaran nilai politik adalah hal utama dimana sastra harus menyesuaikan diri. Pendapat ini menyiratkan gagasan sastra sebagai hiasan yang berlebihan tetapi juga menyiratkan gagasan politik sebagai yang tetap dan percaya diri, sebagai gagasan yang akan menjadi bencana. Ini merupakan pedagogis politik pada tingkat sastra dan politik

yang buruk. Kedua, sastra sebagai kumpulan sentiment manusia yang abadi, sebagai kebenaran manusia yang cenderung diabaikan oleh politik, dan karena itu harus diingatkan dari waktu ke waktu. Konsep ini akan memberi lebih banyak ruang bagi sastra tapi dalam praktiknya ia memberi tugas untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui atau memprovokasi dengan cara yang naif melalui kesenangan yang picisan ; segar dan spontan.

Namun ada satu seperangkat nilai yang dapat ditetapkan bahwa sastra bertanggung jawab untuk melestarikan gagasan klasik, dan sastra yang tidak bergerak sebagai tempat penyimpanan kebenaran yang diberikan. Jika setuju untuk peran ini maka sastra membatasi dirinya pada fungsi hiburan, pelestarian yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan (Calvino. 2022:101). Sastra sangat dibutuhkan oleh politik ketika ia memberikan suara pada apapun yang tidak bersuara, ketika ia memberi nama pada apa yang belum memiliki nama, terutama pada apa yang dikecualikan atau coba yang disingkirkan oleh bahasa politik. Pengaruh lain yang dapat diberikan sastra adalah kemampuan penulis dalam memaksakan pola bahasa, visi, imajinasi, upaya mental, korelasi fakta, dan penciptaan model nilai yang estetis dan yang etis (Calvino. 2022:103).

## **Simpulan**

Penelitian ini telah mengulas kompleksitas konflik Palestina-Israel dengan pendekatan teori poskolonialisme, bahasa, dan sastra. Secara historis, baik bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun Semitik yang sama, dan sejarah konflik ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengaruh Barat terhadap wilayah Timur Tengah. Kritik poskolonial mengungkapkan bagaimana kolonialisme dan imperialisme terus berlanjut meskipun banyak negara bekas jajahan telah merdeka. Kritik ini berfokus pada bagaimana kekuasaan dan pengetahuan dihasilkan melalui budaya dan sastra, yang sering digunakan untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi.

Dalam konteks ini, konflik Palestina-Israel sering kali dipandang sebagai perpanjangan dari kolonialisme modern, di mana kebudayaan, bahasa, dan sastra dijadikan alat untuk memperjuangkan kekuasaan dan hegemoni. Salah satu aspek penting dari konflik ini adalah bagaimana Zionisme, yang didorong oleh tujuan politik dan agama, bertentangan dengan klaim Palestina atas tanah tersebut sebagai warisan umat Islam. Hal ini melahirkan interpretasi yang sangat berbeda antara kedua pihak, yang memperburuk ketegangan.

Pendekatan poskolonial menekankan bahwa segala bentuk ekspresi budaya, termasuk sastra dan bahasa, tidak terlepas dari kepentingan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Edward W. Said, pemahaman Barat terhadap Timur seringkali terdistorsi, dan ini terlihat dalam cara media dan propaganda digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu. Konflik ini, yang memiliki dimensi historis, agama, sosial, dan politik, tidak hanya berdampak pada hubungan antara Palestina dan Israel, tetapi juga memengaruhi dinamika internasional yang lebih luas, termasuk peran Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dalam mempertahankan dominasi mereka di wilayah tersebut.

Kesimpulannya, perbedaan mendasar antara Orientalisme dan Oksidentalisme terlihat jelas dalam tujuan dan pola politik yang mereka bawa. Orientalisme, seperti yang dipaparkan oleh Edward Said, lebih bersifat eksploitatif dan politis, berusaha untuk mendominasi dunia Timur dengan membangun narasi yang menguntungkan

Barat, baik melalui kajian akademis maupun kebijakan kolonial. Sedangkan Oksidentalisme, menurut Hassan Hanafi, cenderung berusaha untuk mengembalikan Barat ke posisinya semula tanpa mengganggu struktur dan budaya Timur. Meskipun ada pandangan berbeda dari Bryan S. Turner yang menilai kedua pandangan tersebut berpotensi berbahaya, baik Orientalisme maupun Oksidentalisme memiliki kecenderungan untuk menegaskan perbedaan geografis dan politis antara Barat dan Timur yang seringkali disertai dengan kebijakan yang merugikan, seperti dalam konteks pendudukan Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang hubungan antara sastra dan politik juga menjadi penting, sebagaimana diungkapkan oleh Italo Calvino, yang melihat sastra sebagai alat yang mampu memberikan suara kepada yang terpinggirkan atau yang tidak terdengar dalam wacana politik. Sastra bukan hanya sebagai cerminan atau pelengkap politik, tetapi juga sebagai bentuk kritikan yang memaksa pemikiran politik untuk bergerak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan. Calvino menyarankan bahwa sastra berperan penting dalam mengungkapkan ketidakadilan, menciptakan imajinasi baru, dan memberikan ruang bagi nilai-nilai yang lebih manusiawi dalam politik, dengan demikian menunjukkan betapa pentingnya peran sastra dalam mendampingi perubahan sosial dan politik yang lebih adil.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada saudara Bram Denafri S.S., M.Hum yang sering berdiskusi, beri masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif.

Seluruh Civitas akademi Universitas Pamulang dan Prodi Sastra Indonesia khususnya yang selama ini telah memberi ruang dan waktu yang kondusif dalam menulis jurnal dan karya akademik lainnya.

Keluarga dan teman-teman yang suka berdiskusi di warung cemara seberang kampus yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian.

Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sastra dan pendidikan di masa yang akan datang.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraini, Ade Eka. *"Postmodernisme Dan Poskolonialisme Dalam Karya Sastra"*. 2018. Rangkasbitung: Jurnal Pujangga Volume 4, Nomor 1. STKIP Setia Budhi Rangkasbitung Email [adeekaanggraini@gmail.com](mailto:adeekaanggraini@gmail.com)
- Barker, Chris dan Emma A.Jane. *"Kajian Budaya Teori dan Praktik"*. 2021. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal.95. Terj.*Cultural Studies: Theory and Practice*, London, 2016
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: Gramedia. 1988
- Calvino, Italo. *"Maslahat Sastra"*, Yogyakarta: BasaBasi. 2022
- Chomski, Noam. *Politik Kuasa Media*. 2021. Jakarta: CV.Jalan Baru.
- During, Simon. *The Post-Colonial Studies Reader*. 2003. London-New York: Routledge.
- Firdaus, Aos Yuli dan Yanyan Mochamad Yani. *"Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel"*. 2020. Jakarta: Populis, Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020 pISSN : 2460-4208 eISSN : 2549-7685.

- Gandhi, Leela. *"Postcolonial Theory A Critical Introduction"* . 1998. Australian: Allen Unwin.
- Hanafi, Hassan. *"Mukaddimah fi al-Ilm al-Estighrab"*. 2000. Beirut: al-Muassasah al-Jami'ah li al-Dirasah wa al-Nashr wa al-Ta'uzi'.
- Hitti, Philip K. *"History of The Arabs"*. 2014. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta.
- Jazuli1, Ahmad, *"Hegemoni Hamas dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Palestina"*.2023, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, E-ISSN: 2502-1044 P-ISSN: 2085-563X DOI: <https://doi.org/10.20961/cmcs.16.1.67057>  
<https://jurnal.uns.ac.id/cmcs>
- Nurdyawati dan Tika Tazkya. *"Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Israel-Palestina"*. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1),  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5204>
- Perpustakaan Nasional-Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. Jakarta: INIS.1995
- Said, Edward W. *"Orientalisme"*. 2001. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Said, Edward W. *"Kekuasaan, Politik, Dan Kebudayaan"*. 2017. Jakarta: PT Buku Seru. Terj.*Power and Cukture: Interview with Edward W Said*, Pantheon Books, New York, 2001
- Santosa, Puji. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa *"KRITIK POSTKOLONIAL: Jaringan Sastra atas Rekam Jejak Kolonialisme"*. 2012.  
<https://www.researchgate.net/publication/327134028>.
- Thanthawi, Mohammad Sayyed. *"Banu Israel fi al-Quran wa al-Sunnah"*. 1997. Cairo: Dar al-Shorooq.
- Turner, Bryan S. *"Orientalisme Postmodernisme Dan Globalisme"*. 2002. Jakarta: Riora Cipta.
- Wikipedia Indonesia. <https://en.wikipedia.org>